

## PENYANDANG DISABILITAS

2021

PERDAKAB. PASURUAN NO. 6, LD 2021/NO. 6, 48 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

**ABSTRAK** : - Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan merupakan warga yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi. Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 1998; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 87 Tahun 2014; PP No. 75 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
- Selain pengertian Penyandang Disabilitas, Perda ini juga mengatur tentang Asas dan Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Penghargaan, Partisipasi Masyarakat, Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Pembiayaan, Komisi Daerah Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas, Larangan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Pidana.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2021.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 18 hlm.